

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang *Pinjaman Daerah*.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan*.
- Asih, N. (2014). Kejati embus kebocoran APBD Jatim Rp 219 Miliar, Beritajatim.com diakses 27 Oktober 2016.
http://www.beritajatim.com/politik_pemerintahan/226506/kejati_endus_kebocoran_apbd_jatim_rp_219_miliar.
- Bawono, I.R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brigham, E.F & Houston, J.F. (2011). *Dasar-dasar manajemen keuangan essentials of financial management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Farell. (2014). Penurunan dana perimbangan terjadi disebagian daerah di Indonesia, Sriwijayatv.com diakses 20 November 2016.
<http://www.sriwijayatv.com/read/8227/penurunan-dana-perimbangan-terjadi-disebagian-daerah-di-indonesia>.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2011). *Corporate social responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Halim, A., & Kusuf, M.S. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusuf, M.S. (2014). *Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S.S. (2013). *Teori akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlinda, D.W. (2015). PAD 2015 minus, pemprov Jatim lakukan efisiensi 5%, Kabarbisnis.com diakses 09 Oktober 2016.
<http://kabar24.bisnis.com/read/20150709/78/451965/pad-2015-minus-pemprov-jatim-lakukan-efisiensi-5>.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh’. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 1, No.1, Agustus 2012, hlm. 15-29.
- Kasmir. (2014). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kusumawardani, M. (2012). ‘Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia’. *Accounting Analysis Journal* Vol 1, No.1, Agustus 2012, hlm. 28-35.
- Laila, Herawati, & Ethika. (2016). ‘Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah’. *Jom Fekon* Vol.9 No.1 , hlm.1-15.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & reformasi paradigma bisnis & akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Maiyora, G. (2015). ‘Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatera’. *Jom Fekon* Vol. 2, No. 2, Oktober 2015 , hlm. 1-15.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masdiantini, P.R., & Erawati, N. M. (2016). ‘Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan’. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 2 Februari 2016, hlm. 1150-1182.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Nordiawan, D., & Herianti, A. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oluwole, O.E. (2013). ‘Intergovernmental fiscal relations in Nigeria’s fourth republic: issues and challenges’. *Covenant University Journal of Politics and International Affairs (CUJPIA)* Vol. 1, No. 2, December, 2013 , page 213-134.
- Patrick, P.A. (2007). ‘The determinant of organizational inovativeness: the adoption of gasb 34 in Pennsylvania local government’. *Pennsylvania: the pennsylvania state university*.
- Prasasti, S.E., & Sari, R.P. (2015). ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah’. *Akmenika* Vol.12 No.5 , hlm. 610-620.
- Rahman, M.R. (2014). Ketergantungan pemda atas dana perimbangan sangat tinggi, [Antarajatim.com](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/134898/ketergantungan-pemda-atas-dana-perimbangan-sangat-tinggi) diakses 25 September 2016.
<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/134898/ketergantungan-pemda-atas-dana-perimbangan-sangat-tinggi>.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sanusi, A. (2011). *Metode penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, I.P. (2016). ‘Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah’. *Jom Fekon* Vol.3, No.1, Febuari 2016, hlm. 679-692.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). ‘Pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah’. *Accounting Analysis Journal* Vol.1, No.1, Agustus 2012, hlm. 1-6.
- Simanullang, G. (2013). ‘Pengaruh belanja modal, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi kepulauan Riau Tahun 2008-2012’. *Umarh Journal Of Accounting* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 1-24.
- Sitanggang, J. (2014). *Manajemen keuangan perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Standar Akuntansi pemerintah. (2012). Bandung: Fokusmedia.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. (2016). *Pedoman penulisan tugas akhir skripsi tahun 2016*. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas pembangunan nasional veteran Jakarta.

Wenny, C.D. (2012). ‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan’. *Jurnal Ilmiah Stie Mdp* Vol 2, No. 1, September 2012 , hlm. 39-46.

